

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

*(Studi Tentang Implementasi Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan
Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun oleh :

RETNO WIDYASTUTI

NIM. 079514748

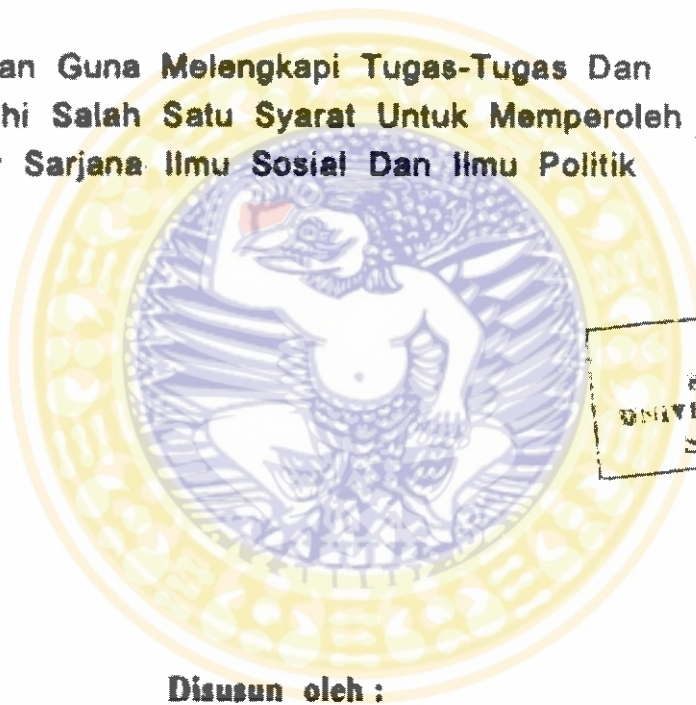
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2000/2001**

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

*(Studi Tentang Implementasi Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan
Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Disusun oleh :

RETNO WIDYASTUTI
NIM. 079514748

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2000/2001**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Tanggal : 12 Juni 2001

Hari : Selasa

Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : FISIP – UNIVERSITAS AIRLANGGA

Panitia Penguji terdiri dari :



Ketua Penguji

Drs. Didid Soepojo, MSi
NIP. 131.289.503

Anggota

Drs. Faliuh Suaedi, MSi
NIP. 131.801.403

Anggota

Drs. Gitadi Tegas S., MSi
NIP. 131.569.363

ABSTRAKSI

Upaya pengentasan kemiskinan sampai dengan Pembangunan Jangka Panjang Kedua masih tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dilakukan pemerintah dengan menggunakan pendekatan *Top Down*. Pendekatan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat pesatnya pembangunan yang dilaksanakan. Akan tetapi di sisi lain menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kesenjangan terjadi karena sumber-sumber yang ada berpusat pada sebagian kecil masyarakat kalangan atas saja. Oleh karena itu sistem pembangunan diubah melalui pendekatan *Bottom Up Planning*. Lahirnya Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang program IDT dan P3DT dinilai sangat strategis dan mendasar untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya justru terdapat banyak masalah. Oleh karena itu sejalan dengan Inpres tersebut, diluncurkan program baru yaitu **Program Pengembangan Kecamatan (PPK)** sebagai keberlanjutan dan penyempurnaan dari program IDT dan P3DT.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan PPK dinilai cukup berhasil meskipun diwarnai dengan berbagai masalah dan kasus yang berkaitan dengan administratif maupun kesiapan aparat dalam menerima program. Adanya kompleksitas masalah dalam pelaksanaan PPK, maka penelitian ini mencoba memfokuskan pada perspektif implementasi kebijakan.

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bermaksud menggambarkan secara mendalam suatu gejala/fenomena. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta penggunaan dokumen sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif karena data-data yang ada sebagian besar merupakan hasil wawancara. Pengambilan *sampel* dilakukan secara *purposive* dengan berpedoman pada petunjuk informan awal. Untuk memeriksa keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber data dengan membandingkan data hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen yang ada.

Dari data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisa dapat dijelaskan bahwa masyarakat telah memperoleh hasil yang sangat bermanfaat bagi hidupnya. Pelaksanaan PPK di Kecamatan Panjatan telah dilaksanakan cukup baik. Tahapan-tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan secara prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu hasil identifikasi masalah yang diperiksa melalui variabel-variabel penelitian memperlihatkan bahwa masih ada kurang-kekurangan dalam pelaksanaan PPK. Rendahnya sumber daya manusia pokmas dan adanya peran ganda aparat pelaksana merupakan salah satu faktor yang mewarnai pelaksanaan program ini. Namun upaya-paya pelaksanaan PPK terus ditingkatkan baik melalui peningkatan sumber daya manusia pokmas maupun aparat pelaksana melalui penyempurnaan kebijakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.